

Strategi Komunikasi Fasilitator Pemberdayaan Kementerian PUPR dalam Membangun Kesadaran dan Dukungan Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah

Communication Strategy of the Empowerment Facilitator of the Ministry of Public Works and Public Housing in Building Awareness and Support of the Community for the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) in Susukan Village, Banjarnegara, Central Java.

Soleh Wahyu Utomo*, Haryo Kusumo Aji**

Ilmu Komunikasi, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

* *Soleh Wahyu Utomo*

wahyuu1806@gmail.com, haryokusumoaji@unisri.ac.id

Abstrak

Komunikasi berperan begitu penting dalam kehidupan sosial manusia, dalam interaksi individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi menjadi kunci pada efektivitas setiap program pemerintah. Diantaranya ialah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program tersebut melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk memastikan implementasi dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Fasilitator Pemberdayaan memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, serta memastikan keberhasilan program melalui pendampingan langsung di lapangan. Penelitian yang peneliti lakukan memiliki tujuan dalam mengevaluasi strategi komunikasi yang dipakai oleh fasilitator pemberdayaan Kementerian PUPR dalam membangun kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program BSPS di Desa Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fokus penelitian adalah pada bagaimana strategi komunikasi tersebut mempengaruhi pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam program perumahan swadaya. Metode penelitian yang peneliti pakai pada penelitian yang dilaksanakan ialah melalui deskriptif kualitatif dan memakai pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, strategi komunikasi fasilitator pemberdayaan Kementerian PUPR Provinsi Jawa Tengah pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Susukan mencakup empat aspek utama: pemberitahuan informasi melalui grup WhatsApp dan pertemuan langsung, motivasi masyarakat dengan menjelaskan manfaat program dan memastikan pelaksanaan sesuai jadwal, edukasi tentang rumah layak huni dan cara mengoptimalkan program, serta penyampaian informasi akurat mengenai standar rumah sesuai Kementerian PUPR. Perlu adanya kolaborasi antara masyarakat, kepala dusun, dan fasilitator sangat penting, dengan pemanfaatan media komunikasi efektif untuk memastikan informasi diterima dan dipahami dengan baik.

Kata kunci: Komunikasi, Fasilitator Pemberdayaan, Perumahan Swadaya

Abstract

Communication plays a crucial role in human social life, whether in individual, group, or organizational interactions. In the governmental context, communication is key to the effectiveness of public programs. An example of this is the Self-Help Housing Stimulus Program (BSPS) managed by the Ministry of Public Works and Housing (PUPR). This program involves Field Facilitators (TFL) to ensure effective implementation and communication with the community. Empowerment Facilitators are responsible for educating and empowering the community, as well as ensuring the program's success through direct field support. This study aims to evaluate the communication strategies used by PUPR empowerment facilitators in building awareness and community support for the BSPS program in Desa Susukan, Banjarnegara, Central Java. The focus is on how these communication strategies affect community understanding and involvement in the self-help housing program. The research employs a descriptive qualitative methodology, including interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the communication strategies of PUPR empowerment facilitators in the BSPS program in Desa Susukan include four main aspects: disseminating information through WhatsApp groups and direct meetings, motivating the community by explaining the program's benefits and ensuring adherence to schedules, educating about adequate housing and program optimization, and providing accurate information on housing standards according to PUPR guidelines. Effective collaboration among the community, village heads, and facilitators is essential, with the use of effective communication media to ensure information is received and understood properly.

Keywords: *Communication, Empowerment Facilitators, Self-Help Housing*

PENDAHULUAN

Menurut pendapat dari Zussarifah (2022:3) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ialah sebuah fasilitas yang pemerintah berikan berwujud sejumlah dana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima bantuan stimulan dalam menolong penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Masyarakat berpenghasilan rendah ialah masyarakat yang tak mampu serta mempunyai keterbatasan daya beli hingga butuh sebuah perhatian dari pemerintah dalam mendapatkan rumah layak huni. Program tersebut mempunyai tujuan dalam

merealisasikan setiap hak warga negara yang wajib mempunyai tempat tinggal yang layak bagi kehidupannya dilingkungan yang aman, harmonis, sehat serta tertib dalam memberi jaminan kepastian hunian. Tentu saja didalam penyelenggaraan program pendampingan dengan basis keluarga tersebut tak hanya diperlukan kerja sama secara baik bersama masyarakat, namun kerja sama secara baik bersama instansi yang bertujuan sebagai aktivitas pendampingan, hingga bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan komunitas dan berhasil untuk menjalankan program bantuan dalam meraih tujuan yang

sudah ditetapkan sebelumnya dengan maksimal.

Pendampingan atau fasilitator lapangan sangat diperlukan untuk mensukseskan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) menjadi bagian yang membantu dalam mensukseskan program BSPS ini. Pekerjaan pendamping fasilitator tentunya tak lepas pada prinsip komunikasi, yakni membuat sebuah komunikasi secara efektif. Efektifnya sebuah komunikasi akan diraih jika munculnya saling pengertian diantara komunikasi serta komunikatornya, ataupun bisa kita sebut munculnya keserasian persepsi mengenai pemaknaan sebuah sesuatu. Kombinasi yang paling baik pada seluruh aspek komunikasi ialah pesan, komunikator, media, penerima serta pengaruh dalam meraih tujuan komunikasi yang paling baik ialah peran (Pangesti, 2018).

Masyarakat dapat disebut berpenghasilan rendah apabila pendapatan dibawah USD \$1 perhari. Bukan faktor itu saja, tetapi di Indonesia pun mempunyai karakteristik kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yakni: 1) kebanyakan tak memiliki faktor produksi sendiri contohnya modal, tanah, keterampilan dan alat untuk bekerja, 2) memiliki tingkatan pendidikan yang rendah, 3) mayoritas

berusaha ataupun bekerja sendiri dan usahanya bersifat kecil (sektor informal), menganggur (tidak bekerja) atau setengah menganggur, 4) mayoritas ada dipedesaan ataupun daerah tertentu di kota (slum area), 5) sedikitnya peluang dalam mendapatkan: pakaian, bahan pokok, fasilitas kesehatan, perumahan, pendidikan, air minum, fasilitas komunikasi, angkutan, kesejahteraan sosial lain. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pun bisa terlihat pada rumah yang dihuni apakah layak, sebab rumah ialah sebuah keperluan wajib untuk tiap individu. Mempunyai sebuah rumah yang layak huni adalah keperluan untuk tiap keluarga. Belakangan ini keperluan terhadap rumah layak huni makin naik, tetap tak selaras pada taraf hidup yang meningkat, ekonomi masyarakat masih lemah yang membuat mereka harus hidup dirumah yang tak layak huni (Nurdiana et al., 2022).

Tabel 1:
Rumah Tidak Layak Huni di
Susukan, Banjarnegara Tahun 2017-
2021

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni
2017	3.180
2018	2.956
2019	2.766
2020	2.535
2021	2.535

Sumber : BPS Banjarnegara, Jawa Tengah 2023

Masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni ataupun yang kelompok fakir miskin miliki, mempunyai multidimensional. Karenanya, kepedulian dalam menyelesaikan permasalahan itu diharap bisa ditingkatkan terus melalui penyertaan semua komponen masyarakat (stakeholder) yang berasal dari pemerintah daerah dan pusat. Pembangunan pemukiman serta perumahan apabila dilaksanakan dengan benar dapat memberi kontribusi secara langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sebab didalam pembangunan perumahan bisa memberi dorongan pada pertumbuhan sebuah daerah dan ekonominya, mendorong pembangunan sosial budaya serta memberi efek multiplier pada sektor lainnya contohnya menciptakan lapangan pekerjaan yang baik secara langsung ataupun tidak (Atmaja & Mahalli, 2015)

Mayoritas masyarakat di Indonesia tinggal dirumah yang dinilai sebagai RTLH atau rumah tidak layak huni. Setiap rumah yang jelek wajib diperbaiki secepatnya supaya menciptakan keadaan hunian yang terlindungi, sehat, tertata dan nyaman serta pemukiman yang kokoh. Dalam penyediaan rumah

layak huni dan lingkungan pemukiman yang layak untuk menjadi lingkungan yang aman, sehat, tertib, serasi, dibutuhkan sebuah tindakan yang cepat. Dikarenakan perumahan saat ini dirasa menjadi hak fundamental didasari pada Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, disebutkan jika tiap orang mempunyai hak agar hidup layak, keadaan tersebut merupakan agenda penting pemerintah (Julianto, 2020).

Tabel 2:

**Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Banjarnegara Tahun 2015-2021**

Tahun	UMK (Rupiah)
2015	1.112.500
2016	1.265.000
2017	1.370.000
2018	1.490.000
2019	1.610.000
2020	1.805.000
2021	1.819.781

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

UU No. 1 Th. 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Kementerian perumahan rakyat lewat deputi bidang perumahan swadaya menjalankan penanganan RTLH lewat penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat miskin. Berdasarkan dari PP No. 38 Tahun 2007, menerangkan jika perumahan adalah urusan wajib

pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kota/kabupaten.

Jenis kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut mengacu terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Perumahan No. 14/SE/Dr/2022 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Dimana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang lolos seleksi menjadi penerima bantuan BSPS nantinya memperoleh bantuan berupa uang senilai Rp. 20.000.000, yang mana uang sebesar Rp. 17.500.000,- digunakan dalam membeli bahan bangunan serta Rp. 2.500.000,- digunakan bagi upah kerja dan upah tersebut dibayarkan sebanyak 2 kali. Didasari dari data yang diambil oleh Kementerian PUPR tahun 2013 menyebutkan jika, masih terdapat sejumlah 1,9 juta rumah yang tidak layak huni. Rumah yang sudah direalisasikan berjumlah 206.500 unit setiap tahunnya yang menelan anggaran sebesar Rp. 4,28 T yang asalnya dari APBN. Pemerintah terus mengupayakan dalam meminimalisir RTLH yaitu melalui program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pondasi utama dalam keberhasilan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Desa Susukan Banjarnegara, Jawa Tengah. Melalui strategi komunikasi yang efektif, Kementerian PUPR menggalang kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program ini. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa rumah-rumah yang mendapatkan bantuan BSPS mengalami perubahan signifikan, meningkatkan kualitas hidup pemiliknya. Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi, yaitu masyarakat yang kurang sadar atau bahkan tidak memahami akan pentingnya memiliki rumah yang layak huni.

Masyarakat tidak sadar tentang rumah tidak layak huni dapat muncul karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya pendidikan atau pemahaman tentang standar kelayakan hunian yang aman dan layak bagi keluarga. Mereka mungkin tidak memahami dampak buruk dari tinggal dirumah yang tidak sesuai standar, seperti resiko keamanan serta kesehatan. Kedua, kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat masyarakat terjebak dalam situasi dimana mereka tidak memiliki pilihan selain tinggal dirumah yang tidak layak huni. Faktor ekonomi ini juga bisa menyebabkan kurangnya akses terhadap perbaikan rumah yang diperlukan. Selain itu, kurangnya informasi atau komunikasi yang efektif tentang pentingnya memiliki rumah yang layak huni juga

bisa menjadi penyebab. Jika masyarakat tidak diberikan pemahaman yang cukup tentang risiko dan konsekuensi tinggal di rumah yang tidak layak, mereka mungkin tidak menyadari urgensi untuk melakukan perbaikan atau memanfaatkan program-program bantuan seperti BSPS.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi fasilitator pemberdayaan Kementerian PUPR dalam membangun kesadaran dan dukungan masyarakat pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Susukan Banjarnegara Jawa Tengah yang termasuk suatu daerah yang menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena terkait tingkah laku, motivasi, dan persepsi subjek. Lokasi penelitian di Desa Susukan, RT 003/RW 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dipilih karena relevansinya dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan ketersediaan data yang memadai.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terpercaya, seperti tenaga fasilitator

dan warga penerima bantuan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi program. Informan dipilih menggunakan purposive sampling agar memiliki pengetahuan mendalam.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi, menggunakan berbagai metode untuk memverifikasi temuan. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

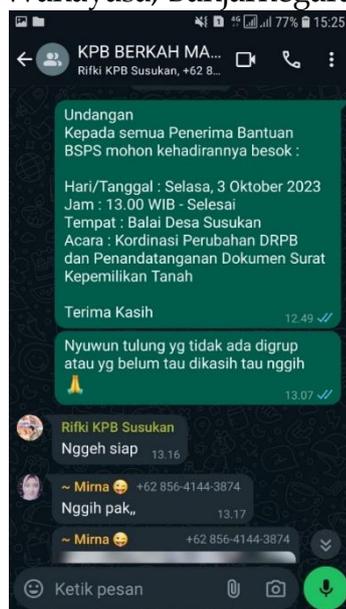
Strategi komunikasi fasilitator pemberdayaan Kementerian PUPR Provinsi Jawa Tengah dalam membangun kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Susukan:

1. Memberitahu

Sebelum Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan memberitahu informasi yang akan disampaikan kepada Masyarakat desa Susukan, TFL mengamati kondisi lingkungan, aktivitas masyarakat, serta interaksi sosial antarwarga untuk memahami kebiasaan dan dinamika sosial di desa. Dengan mendatangi rumah-rumah warga, TFL bisa membangun hubungan personal masyarakat, TFL sering menghadiri rapat desa atau

pertemuan warga, serta TFL dapat mendekati tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, ketua RT, pemuka agama, atau pemuda desa untuk mendapatkan informasi dan pandangan mengenai kondisi masyarakat. Kemudian, pihak TFL akan membuat grup WhatsApp, dimana informasi-informasi penting akan diberitahukan melalui grup WhatsApp perangkat desa dan warga sekitar. Hal tersebut agar informasi disampaikan melalui grup mereka masing-masing.

Gambar 1: Penginformasian terkait koordinasi terhadap penerima program BSPS di desa Susukan, Wanayasa, Banjarnegara



Sumber : Grub WA Penerima program BSPS desa Susukan, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah 2023

Berdasarkan gambar 1 secara langsung dari pihak Fasilitator serta pendamping Fasilitator Pemberdayaan memberitahu kepada masyarakat desa Susukan tentang Program BSPS, mereka akan

melakukan pertemuan di balai desa untuk melaksanakan koordinasi dan penandatanganan dokumen terkait program tersebut. Selain itu, penyampaian informasi tidak hanya dilakukan melalui grup WhatsApp saja, melainkan melalui hasil sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya rumah layak huni yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan dari Kementerian PUPR dan harus terpenuhinya berbagai aspek, mulai dari keselamatan bangunan (kekuatan bangunan); aspek kecukupan luas ruang (sesuai sdg's terpenuhinya luas 7,2m² untuk perorang); dan aspek kesehatan (kejadiannya sanitasi yang baik, pencahayaan, dan penghawaan tersedianya air bersih).

Gambar 2: Stiker terkait program BSPS tidak ada pungutan biaya



Sumber : (Dokumentasi TFL,2023)

Berdasarkan gambar 2 diatas, informasi terbaru dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan adanya informasi yang diberitahukan kepada Masyarakat ialah informasi yang sudah jelas kebenarannya. Hasil wawancara dengan Tenaga Fasilitator Lapangan

(TFL) Pemberdayaan menjelaskan dengan tercapainya rumah layak huni maka para penerima bantuan dapat hidup dengan baik melalui ketersediaan fasilitas hunian yang memenuhi aspek rumah layak huni. Dari adanya keterbukaan kegiatan padat karya melalui tenaga kerja tukang dan pekerja mampu terserap dalam program BSPS. Selain itu, berdasarkan wawancara kepada warga desa penerima program bahwa mereka bisa lebih memahami pentingnya rumah yang layak huni.

2. Memotivasi

Melalui penyampaian informasi Fasilitator Pemberdayaan desa Susukan, kepala dusun desa Susukan mendukung penuh atas sosialisasi desa terkait program BSPS dari pihak Kementerian PUPR dan membutuhkan kesadaran dan dukungan Masyarakat untuk memarakkan program BSPS. Hasilnya, kegiatan dijalankan sesuai tahapan, kegiatan dilakukan sesuai jadwal dan tepat waktu, serta mampu melakukan pendampingan secara efektif, tepat, dan berkualitas dalam setiap tahapan.

3. Mendidik

Dalam hal ini, dilaksanakan adanya pendampingan dan memfasilitasi penerimaan sesuai hasil wawancara terkait manfaat dalam menjalankan program BSPS berupa membantu mewujudkan rumah layak huni dari yang semula tidak layak huni atas prakarsa (masyarakat sebagai pelaku utama dalam program BSPS), dan

mendorong optimalisasi kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan dalam program BSPS. Dengan memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah dalam setiap tahapan jika terjadi kendala. Dalam melakukan hal di atas, dibutuhkan kerja sama dengan pihak terkait terutama dinas kabupaten dan pemerintah desa setempat selaku penerima program dengan baik dan bersinergi dalam setiap tahapan kegiatan BSPS. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui progres kegiatan BSPS pada setiap penerima bantuan. Serta mengupayakan dan berkordinasi untuk mencari alternatif dan solusi pemecahan masalah yang terjadi secara bersama antar berbagai pihak.

Gambar 3: Koordinasi TFL terkait program BSPS di desa Susukan, Wanayasa, Banjarnegara



Sumber : Grub WA TFL program BSPS desa Susukan, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah 2023

Melalui pemberian informasi yang belum banyak diketahui oleh warga Masyarakat desa Susukan yang menjadikan informasi bermanfaat dan bisa digunakan oleh warga sesuai kebutuhannya, salah satunya dilakukan oleh tenaga fasilitator pemberdayaan dan pendampingnya dalam program BSPS didesa Susukan. Pihak tersebut juga harus mengupayakan pemahaman kepada penerima bantuan yang telah dibantu melalui program BSPS tentang pentingnya rumah layak huni untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat yang lainnya baik secara teknis pembangunan rumah maupun yang bersifat non teknis.

Menurut hasil wawancara kepada kepala dusun, beliau mengatakan bahwa dari pihak warga sangat diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BSPS. Hal itu berguna agar warga mampu memahami program BSPS yg diterima, dapat menjalankan program sesuai dengan aturan, mampu mengembangkan potensi sumber daya yg dalam kegiatan BSPS adalah keswadayaan pada Masyarakat. Kemudian pengembangan kelompok penerimaan bantuan untuk mempermudah pelaksanaan dan mengelola kelompok masyarakat penerima bantuan dan penyediaan informasi yang tepat terkait program BSPS kepada seluruh warga tanpa terkecuali.

Adapun 4 faktor penting sesuai dengan teori Anwar Arifin dalam

buku yang ditulis oleh (Zamzani & Sahana, 2021) sebagai berikut:

1. Mengenal Khalayak

Dalam penelitian ini, tenaga fasilitator pemberdayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Susukan mengidentifikasi khalayak mereka, yaitu masyarakat desa Susukan, melalui dua cara utama: komunikasi langsung dan grup WhatsApp. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat serta diskusi dan berbagi informasi melalui grup WhatsApp, mereka dapat memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat dengan lebih mendalam. Dengan pemahaman yang mendalam ini, mereka mampu menyesuaikan pesan serta metode komunikasi yang digunakan, sehingga lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan mencapai tujuan pemberdayaan.

2. Menyusun Pesan

Pesan-pesan yang disampaikan oleh tenaga fasilitator melalui grup WhatsApp dan pertemuan di desa disusun dengan jelas dan terstruktur untuk memotivasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Contohnya, sosialisasi program dilakukan di balai desa, di mana tenaga fasilitator menjelaskan secara rinci manfaat dari rumah layak huni. Melalui penjelasan yang komprehensif dan contoh nyata, masyarakat diajak untuk memahami bagaimana program ini dapat

meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dan sehat. Dengan demikian, pesan-pesan tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program BSPS dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya memiliki rumah yang layak huni.

3. Menetapkan Metode

Fasilitator di Susukan menerapkan metode redundansi dengan mengulang-ulang pesan melalui grup WhatsApp dan pertemuan langsung, sehingga memastikan bahwa informasi penting selalu diingat oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga menggunakan metode edukatif dengan memberikan informasi yang lengkap dan mendetail mengenai pentingnya memiliki rumah layak huni. Dalam setiap pertemuan, fasilitator menjelaskan proses pelaksanaan program BSPS secara rinci, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui, persyaratan yang harus dipenuhi, dan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh. Dengan pendekatan ini, fasilitator tidak hanya memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi aktif dan mendukung keberhasilan program BSPS.

4. Seleksi dan Penggunaan Media

Fasilitator di Susukan memilih menggunakan grup WhatsApp

sebagai media komunikasi utama karena media ini mampu menjangkau sebagian besar masyarakat desa dengan cepat dan efisien. Grup WhatsApp memungkinkan informasi penting disebarluaskan secara real-time, memastikan bahwa masyarakat dapat menerima dan merespons pesan dengan segera. Selain itu, fasilitator juga mengadakan pertemuan langsung sebagai pelengkap untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam dan interaktif. Pertemuan langsung ini memberikan kesempatan bagi fasilitator untuk menjelaskan informasi secara lebih rinci, menjawab pertanyaan masyarakat, dan memberikan klarifikasi jika ada hal yang kurang dipahami. Dengan kombinasi antara komunikasi digital dan tatap muka, fasilitator dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan direspon dengan baik oleh seluruh masyarakat desa Susukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh fasilitator pemberdayaan Kementerian PUPR Provinsi Jawa Tengah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Susukan sangat efektif dalam membangun kesadaran dan dukungan masyarakat. Fasilitator menerapkan strategi dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan, mulai dari pemberitahuan, motivasi, pendidikan,

hingga penyampaian informasi secara sistematis. Disamping komunikasi langsung dengan warga, fasilitator memanfaatkan teknologi digital seperti grup WhatsApp dalam memfasilitasi penyebaran informasi yang lebih cepat dan efektif, sekaligus membangun hubungan yang lebih personal antara fasilitator dan masyarakat. Selain itu, fasilitator memberikan panduan teknis terkait konstruksi guna memastikan bahwa penerima manfaat memahami cara membangun rumah yang kuat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal tersebut memperkuat peran masyarakat dalam keberhasilan program. Terakhir, melakukan monitoring berkala guna memastikan pembangunan rumah sesuai standar dan mencapai target SDG's. Fasilitator bersinergi dengan masyarakat dan pihak terkait agar memperkuat keberhasilan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, H. K., & Mahalli, K. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(4), 1-18.
- Julianto, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru (2020). *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(2), 1-12.
- Nurdiana, N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak

Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Prkp) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu Di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 29-34.

Pangesti, L. A. (2018). Strategi Komunikasi Divisi Public Relations Pln Distribusi Jawa Barat Dalam Sosialisasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran. *Komunikasi*, 12(1), 31-39.

Zussarifah. (2022). *Proses Kerja Humas Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Mensosialisasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.